

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang, dengan wilayah pesisir yang sangat produktif. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang produktif, kaya akan sumber daya alam yang dimanfaatkan dengan berbagai cara. Salah satu kekayaan sumber daya pesisir adalah mangrove. Merujuk data Badan Pusat Statistik per Desember 2021, luas mangrove atau ekosistem mangrove Indonesia mencapai 3,63 juta hektar (Ha), walaupun hutan mangrove di Indonesia hanya sekitar 2 persen dari total hutan yang berada di Indonesia. Hutan mangrove yang berada di Indonesia mencakup 20,37 persen dari total luas mangrove dunia, sehingga Indonesia memiliki keunggulan yang luar biasa. mengembangkan mangrove (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2022). Pentingnya keberadaan mangrove tidak sejalan dengan kelestarian mangrove Indonesia. Mangrove Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan fungsi dan kerusakan baik kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu diperlukan upaya konservasi (Arianti D & Satlita L, 2018).

Ekosistem mangrove berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim dengan memberikan jasa lingkungan berupa penyimpan karbon yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan manusia (Fitria & Dwiyanto, 2021). Pentingnya ekosistem mangrove adalah sebagai penyimpan karbon, dimana hutan mangrove

diketahui menyimpan karbon dalam jumlah besar sehingga membantu mengurangi jumlah karbon dioksida di atmosfer dan melakukan mitigasi perubahan iklim. Manfaat selanjutnya adalah untuk perlindungan terhadap bencana alam, yaitu hutan bakau yang ada dapat membantu melindungi wilayah pesisir dengan sebagai zona penyangga dan mengurangi dampak gelombang dan angin terhadap daerah pesisir pantai dari bencana alam seperti angin topan dan abrasi (Sofian, 2023). Manfaat selanjutnya adalah sebagai ekosistem keanekaragaman hayati yang mana hutan bakau adalah rumah bagi beragam spesies tumbuhan dan hewan. Hutan mangrove mempunyai potensi sebagai tempat mencari mata pencaharian bagi Masyarakat. Kesimpulannya, ekosistem mangrove penting dalam mitigasi perubahan iklim karena kemampuannya dalam menyimpan karbon, melindungi dari bencana alam, menjaga keanekaragaman hayati, dan menyediakan penghidupan bagi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, upaya konservasi harus dilakukan untuk melestarikan ekosistem ini.

Kawasan konservasi hutan mangrove salah satunya ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Konservasi Hutan Mangrove Pantai Pasir Kadilangu yang terletak pada Dusun Pasir Kadilangu Desa Jangkarang Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo. Hutan mangrove ini berada pada pesisir pantai Pasir Mendit. Kawasan konservasi ini di tandai dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Budyarto, 2017).

Salah satu pendekatan dalam upaya pengelolaan dan konservasi sumber daya alam merupakan pendekatan *collaborative governance*. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara sektor publik dan swasta dalam mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam produksi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Florini & Pauli, 2018). Collaborative governance juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan efektivitas administrasi publik. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, collaborative governance dapat membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program (Vazquez-Brust et al., 2020). Pendekatan ini juga dapat membantu menciptakan inovasi kolaboratif yang dapat membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, Cooperation Framework dapat menjadi kendaraan untuk mendukung transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan memperkuat kemitraan antara pemerintah, masyarakat sipil, dan semua pemangku kepentingan lainnya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Mariani et al., 2022).

Peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan warga setempat untuk melakukan pengelolaan kawasan konservasi hutan mangrove, karena topik ini sangat relevan dengan fenomena alam abrasi yang terjadi di pesisir pantai di pulau Jawa. Penelitian ini direncanakan yang mana membahas tentang pengaruh kerjasama dari pemerintah dengan warga

setempat untuk mengelola kawasan hutan mangrove dalam penanggulangan kejadian abrasi yang terjadi di pesisir pantai selatan. Peneliti ingin menggunakan metode kualitatif untuk penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini menggunakan menggunakan teori *Collaborative Governance* menurut Thomson dan Perry.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan Teori *Collaborative Governance* Thomson dan Perry tahun (2006) yang disebut sebagai "Collaboration Processes: Inside the Black Box". Teori ini menyatakan bahwa kolaborasi merupakan konstruksi tingkat tinggi dibandingkan kerja sama atau koordinasi, karena memerlukan tingkat interaksi dan saling ketergantungan yang lebih dalam antar aktor. Teori ini juga mengusulkan bahwa kolaborasi terjadi seiring berjalannya waktu ketika organisasi berinteraksi, dan kolaborasi yang efektif memerlukan visi bersama, kepercayaan, dan kemauan untuk berkompromi. Namun, teori tersebut mengakui bahwa kolaborasi mungkin sulit dicapai karena faktor-faktor seperti ketidakseimbangan kekuasaan, gangguan komunikasi, dan perbedaan budaya organisasi. Secara keseluruhan, teori tata kelola kolaboratif Thomson dan Perry telah memberikan kontribusi terhadap pemahaman kolaborasi dalam administrasi publik dan telah menginformasikan pengembangan strategi kolaborasi yang efektif antar pemangku kepentingan (Thomson & Perry, 2006).

B. Rumusan Masalah

Bagaimana praktik kerjasama (*collaborative*) dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove Jangkaran?

1. Faktor apakah yang menyebabkan kolaborasi itu terjadi?
2. Bagaimana proses dari kolaborasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana praktik kerja sama pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan Masyarakat setempat dalam pengelolaan kawasan konservasi hutan mangrove Jangkaran.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan yaitu

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan terobosan kolaborasi dari stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi hutan mangrove yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

- 1) Membagikan pengetahuan bagi masyarakat tata cara pengelolaan hutan mangrove.
- 2) Menjadikan masyarakat tau apa arti penting kawasan hutan konservasi hutan mangrove bagi kelestarian alam di Indonesia

b. Bagi Pemerintah

1. Meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan mangrove karena melibatkan pemerintah
2. Memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam pengoptimalan pengembangan konservasi mangrove

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan literature review pada penelitian terdahulu untuk melihat gap penelitian terdahulu dan penelitian penulis. Tata kelola kolaboratif tidak terbatas pada pengaturan yang diprakarsai oleh negara dan keterlibatan antara sektor pemerintah dan non-pemerintah. Hal ini mencakup kolaborasi antara pemerintah di berbagai tingkat dan kemitraan hibrida yang diprakarsai oleh sektor swasta atau masyarakat. Tata kelola kolaboratif melibatkan berbagai aktor, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, kelompok masyarakat, dan entitas sektor swasta, yang bekerja sama untuk mengatasi masalah publik yang kompleks. Hal ini ditandai dengan fokus pada pembentukan konsensus, musyawarah, dan pengambilan keputusan bersama. Tata kelola kolaboratif penting untuk mendorong saling pengertian dan konsensus di antara para pemangku kepentingan.

Dari jurnal penelitian terdahulu mengenai pengelolaan kawasan konservasi hutan mangrove, jurnal penelitian dengan judul *Collaborative Governance* Dalam Upaya Penanggulangan Abrasi di Pesisir Pantai Kota Dumai yang diteliti oleh Chandra, (2023) membahas tentang proses percepatan rehabilitasi mangrove yang kurang

optimal karena adanya beberapa factor penghambat proses *collaborative governance* seperti pandemi Covid-19, keterlambatan pencairan anggaran, dan kurang intensifnya sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian lain yang membahas *collaborative governance* untuk yang bersangkutan dengan pengelolaan Pantai dengan judul *The Collaborative governance on the Development of Mangrove Baros Conservation in the Village of Tirtohargo Kretek Districk Bantul Regency* yang diteliti oleh Arianti D & Satlita L, (2023) penelitian ini membahas tentang proses *collaborative governance* dalam pengembangan konservasi mangrove Baros beserta hambatannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan konservasi mangrove Baros diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan instansi-instansi lain maupun masyarakat setempat. Hasil dari penelitian tersebut adalah menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros dilakukan dengan konsep *agro silvo fishery* sudah dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Dalam pengelolaan wilayah konservasi terdapat penelitian yang berfokus pada strategi pengelolaan konservasi mangrove dengan judul Strategi Pengelolaan Konservasi Mangrove Wonorejo Berdasarkan Preferensi Stakeholder yang diteliti oleh Widiyah Wati M, (2017) memberikan hasil karakteristik pengelolaan konservasi mangrove Wonorejo belum memenuhi prinsip konservasi khususnya prinsip konservasi lingkungan dan manajemen pengelolaan. Penelitian lain tain yang melakukan fokus terhadap pengelolaan ekowisata mangrove di Indonesia dengan judul Tata Kelola

Kolaboratif Pengelolaan Ekowisata Mangrove di Indonesia Efendi & Juni, (2021). penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat penting dalam pengelolaan ekowisata mangrove yang melibatkan pemerintah, pengelola, swasta, dan masyarakat setempat. Penelitian lain yang membahas tentang aktor-aktor yang berperan dalam pembangunan dan pengelolaan hutan mangrove di Indonesia dengan penelitian berjudul Kolaborasi Aktor dalam Pembangunan Pariwisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan yang diteliti oleh Umar et al., (2019). penelitian ini memiliki hasil bahwa praktik kolaboratif pengembangan wisata hutan mangrove Tongke-Tongke di Kabupaten Sinjai merupakan solusi terbaik dalam menyikapi keterbatasan masing-masing aktor dalam melakukan koordinasi dengan unit organisasi Kabupaten Sinjai, menciptakan partisipasi dan sinergitas aktor-aktor yang komunikatif dan terbuka. Serta mampu membangkitkan kepercayaan dan komitmen para pelaku untuk menciptakan kesamaan pemahaman dalam mengatasi permasalahan pembangunan Tongke-Tongke di bidang wisata hutan mangrove. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Giffany Novitasari, (2021) tentang strategi tata kelola ekosistem mangrove di Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat penting dalam pengelolaan mangrove. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Penelitian yang dilakukan oleh Susilawati Et Al., (2020) yaitu penelitian yang menunjukkan kendala utama dalam pengelolaan WKOP yang mana belum adanya integrasi biaya dan biaya masuk, infrastruktur menuju WKOP yang buruk, fasilitas yang kurang memadai, dan pintu masuk yang terlalu banyak . kendala lainnya adalah kurangnya peran pemangku kepentingan, khususnya masyarakat setempat Pemerintah Kabupaten Langkat, kurang tegasnya penegakan peraturan mengenai lingkungan dan kebersihan, kurangnya informasi dan promosi pariwisata, serta rendahnya pola pikir dan kesadaran masyarakat akan pentingnya ekowisata dan konservasi. Selanjutnya penelitian yang diteliti oleh Hartanto et al., (2019) berfokus pada cara konservasi kerjasama antar organisasi untuk membantu perlindungan kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu Kabupaten Magelang. Dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistemnya serta lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu hidup manusia dalam rangka pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan, diperlukan kerjasama antar lembaga pemangku kepentingan terkait dalam pengelolaan potensi baik sumber daya air maupun sumber daya alam. pariwisata sangatlah penting.

Penelitian berikutnya adalah penelitian yang diteliti oleh Purnomo, (2004) tentang fasilitasi merupakan ketrampilan untuk memimpin proses-proses dalam sebuah kelompok, dan dalam pengertian yang lebih kompleks ini melibatkan semua strategi untuk mendukung kolaborasi. Proses pemodelan mencakup proses identifikasi masalah, tujuan dan batasan; konseptualisasi model; formulasi model; evaluasi model;

dan penggunaan model. Proses-proses ini melibatkan penggalan informasi, sistematisasi, dan evaluasi situasi serta pemanfaatan. Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian oleh Nurlia et al., (2018) membahas tentang pengelolaan kolaboratif kawasan hutan di Tahura WAR. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kolaboratif kawasan hutan di Tahura WAR dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan memperkuat kapasitas mereka dalam mengelola hutan.

Dari penelitian-penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya sebagian besar berfokus pada kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga terkait, serta penerapan strategi pengelolaan yang efektif dan partisipasi masyarakat yang kuat, yang merupakan kunci bagi Indonesia. Unsur pengelolaan cagar mangrove dan ekowisata. Pada saat yang sama, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan tentang praktik kolaboratif pengelolaan ekowisata mangrove yang diharapkan dapat meningkatkan kelestarian lingkungan, meningkatkan perekonomian lokal, dan memberdayakan masyarakat lokal.

F. Landasan Teori

1. Collaborative Governance

Dalam kamus Heritage Amerika (2000), kolaborasi diartikan sebagai kegiatan bekerja sama khususnya dalam usaha penyatuan pemikiran. Hal itu senada dengan pendapat Wood & Gray, (1991) yang mengemukakan bahwa “*Collaboration as a process through which parties who see differences and search for solution that go beyond their own limited version of what is possible*” yaitu dapat diartikan kolaborasi sebagai sebuah proses yang melaluinya pihak-pihak dapat melihat perbedaan dan mencari solusi yang melampaui versi terbatas mereka sendiri tentang apa yang mungkin dilakukan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Ansell & Gash, (2008) yang mengembangkan kerangka konsep kolaborasi dengan pendekatan berbasis sistem yang kemudian menemukan konsep “*collaboration governance*” yang dapat didefinisikan “*a governing arrangement where, one or more public agencies directly engage nonstate stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-orientated, and deliberative and that aims to make or implement public or manage public program or assets*” yaitu sebagai susunan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga public secara langsung terlibat dengan *stakeholder* non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsesus dan deliberatif, yang bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan public atau mengelola kebijakan program atau mengelola suatu aset.

Pendapat lainnya datang dari Thomson & Perry, (2006:23) yang memberikan definisi tentang apa itu kolaborasi “*Collaboration is a process in which autonomous actors interact through formal and informal negotiation, jointly creating rules and structures governing their relationships and ways to act or decide on the issues that brought them together; it is a process involving shared norms and mutually beneficial interactions*” yang mana definisi tersebut menunjukkan Tindakan kolektif yang lebih tinggi dibandingkan kerja sama atau koordinasi.

2. Inside The Black Box

Peneliti akan menggunakan teori *collaborative governance* berdasarkan pendapat dari Thomson dan Perry yang menjelaskan bahwa kolaborasi adalah proses dimana aktor-aktor berinteraksi baik secara formal maupun secara informal, yang mana aktor-aktor tersebut bernegosiasi untuk membuat aturan tentang hubungan mereka. Di dalam penelitian ini yang dimaksud kolaborasi antar organisasi atau antar kelompok independen untuk membuat kebijakan tentang bagaimana pengelolaan sumber daya alam itu dilakukan. Di dalam penelitian ini terdapat kolaborasi yang dilakukan oleh beberapa stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan wilayah konservasi hutan mangrove Jangkar. Di dalam penelitian ini membahas tentang ikut andil peran pemerintah dalam pengelolaan wilayah konservasi. Peneliti menggunakan teori *collaborative governance* gagasan dari Thomson dan Perry.

Penelitian *Inside the Black Box* ini terdapat tiga proses kolaborasi yaitu adalah *antecedent, process, and outcomes*. Hal ini dapat dilihat pada (*figure 1*)

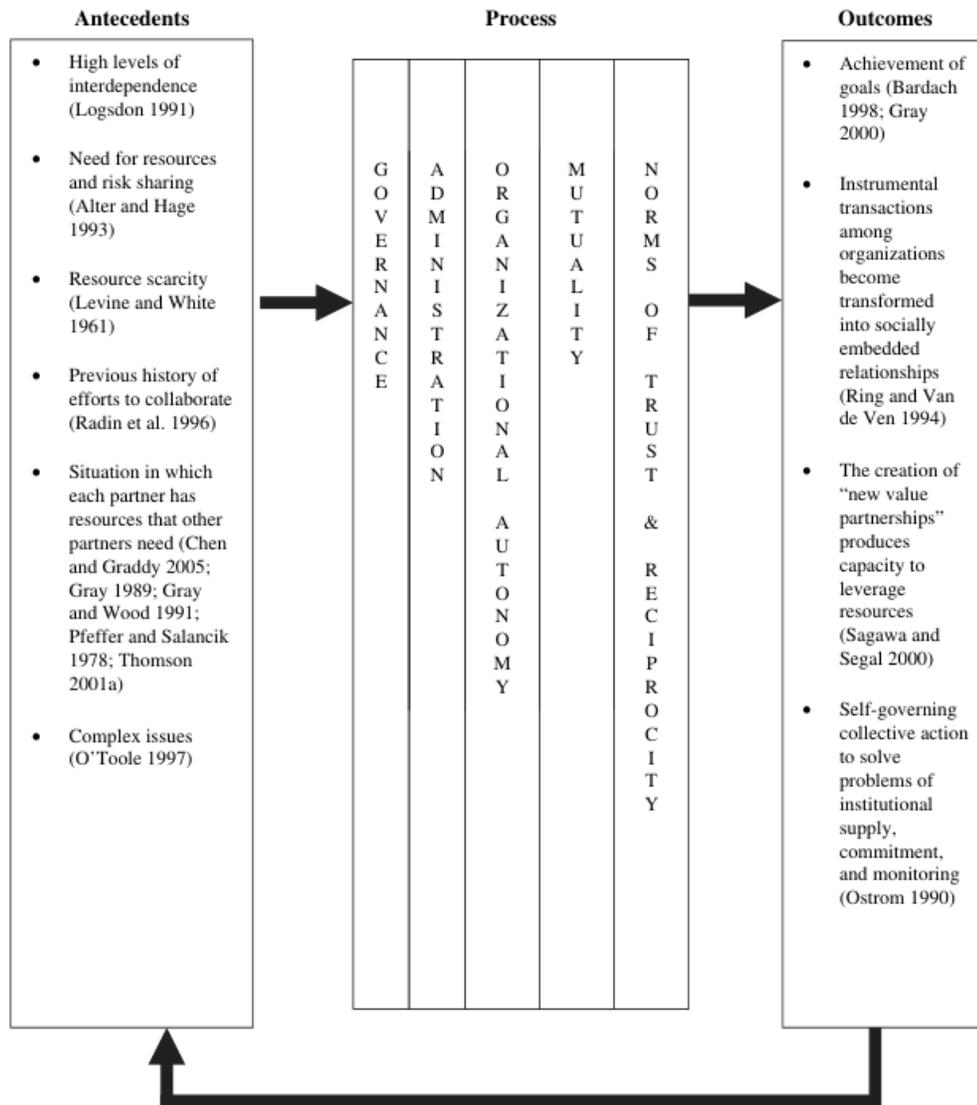


Figure 1

1. *Antecedents* berisikan beberapa tahapan yaitu

- a. *High levels of interdependance* adalah merupakan tingkat saling ketergantungan yang tinggi mengacu pada situasi di mana entitas atau pemangku kepentingan yang berbeda sangat bergantung satu dengan yang lain demi tujuan untuk mencapai tujuan bersama (Logsdon, 1991).
- b. *Need for resources and risk sharing* adalah perlunya sumber menyoroti pentingnya pembagian sumber daya dan risiko dalam upaya kolaboratif. Pembagian risiko diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan keadaan, dan meningkatnya keterbatasan sumber daya telah meningkatkan kebutuhan organisasi untuk bekerja sama. Kepercayaan penting dalam memastikan pembagian sumber daya yang adil, dan kolaborasi antar institusi pendidikan tinggi memerlukan sumber daya tambahan untuk mencapai tujuan. Terakhir, model persepsi risiko dalam penataan aliansi menekankan pentingnya sumber daya dan pembagian risiko dalam aliansi strategis (Alter & Hage, 1993).
- c. *Resource scarcity* adalah Kelangkaan sumber daya merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan pendekatan interdisipliner dan solusi berkelanjutan untuk menjamin distribusi yang adil dan penggunaan sumber daya yang efisien untuk generasi sekarang dan masa depan (Levine & White, 1961).
- d. *Complex issues* adalah adanya masalah yang cukup kompleks yang terjadi di suatu tempat yang mengharuskan adanya kolaborasi di dalam suatu pengelolaan.

2. *Process* merupakan tahapan-tahapan yang terjadi di dalam kolaborasi yang di gagas oleh Thomson dan Perry. Ada beberapa tahapan yang terjadi di dalam proses yaitu
 - a. *Governance* Istilah "*governance*" mengacu pada suatu negara, aktivitas, atau usaha yang melibatkan pelaksanaan kebijakan pemerintah, masyarakat, swasta, atau swasta, serta proses lain apa pun untuk pengambilan kebijakan pemerintah atau tingkat negara-negara (Ayu Caesar Isabela M, 2022). Di dalam proses tata kelola memiliki dimensi terkait yang dijelaskan oleh Thomson dan Perry yaitu Dimensi Tata Pemerintahan (*The Process of Collaborative Governing: The Governance Dimension*) yang mana kebijakan yang di ambil harus dengan kesepakatan bersama. Ketika para pihak berkumpul untuk berkolaborasi, mereka membuat pilihan yang mengatur berbagai masalah tindakan kolektif yang tersirat dalam pengambilan keputusan bersama sulit, dan pada saat ini kami tidak dapat menentukan tingkat optimal untuk kelima dimensi. Daripada bersikeras untuk mencapai tingkat tertinggi pada kelima dimensi, tantangan bagi pengelola publik dan mitra yang berkolaborasi adalah mencari keseimbangan antar dimensi melalui akomodasi bersama dan insentif untuk negosiasi ulang. bagaimana mengembangkan seperangkat aturan kerja secara kolektif untuk menentukan siapa yang berhak mengambil keputusan, tindakan apa yang diperbolehkan atau dibatasi, informasi apa yang perlu disediakan, dan bagaimana biaya dan manfaat akan didistribusikan (Ostrom 1990). Kunci keberhasilan pilihan-pilihan ini terletak pada kesediaan peserta

untuk memantau diri mereka sendiri dan satu sama lain serta menerapkan sanksi yang dapat dipercaya terhadap mitra yang tidak patuh.

- b. *Administration* adalah hal yang mencakup segala upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, mulai dari pembentukan hingga pengelolaan segala sesuatunya. Secara umum pengertian administrasi dapat digunakan oleh lebih dari satu orang karena administrasi menghubungkan pekerjaan dua orang atau lebih sehingga dapat bekerja sama. Menurut Siagian (2012:13), administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada alasan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam administrasi juga mempunyai Dimensi Administrasi (*The Process of Collaborative Administration The Administration Dimension*) yaitu dimensi yang mengatur tentang administrasi yang dijalankan dalam melakukan sebuah kolaborasi.
- c. *Organizational Autonomy* adalah pilihan desain organisasi mendasar yang memegang posisi sentral dalam teori dan praktik manajemen (Arregle et al., 2022). Dalam pelaksanaannya *organizational autonomy* memiliki suatu dimensi yaitu Dimensi Otonomi (*The Process of Reconciling Individual and Collective Interests: The Autonomy Dimension*) yang mana Dimensi otonomi memiliki hubungan yang kontras antara kontrol bersama dan kontrol individu (Wood & Gray, 1991). Dalam sebuah kolaborasi, actor yang terlibat mempertahankan kontrol individu. Di sisi lain, kontrol Bersama melibatkan ketersediaan mitra untuk berbagai informasi, bukan hanya tentang operasi

organisasi mereka sendiri, tetapi juga tentang apa yang mereka bisa dan tidak bisa dalam berkolaborasi. Dimensi ini mencoba menangkap ketegangan yang implisit antara kepentingan aktor dan kepentingan bersama. Indikator dimensi otonomi ini berkaitan dengan sejauh mana aktor melihat kolaborasi sebagai penghalang misi organisasi, kepercayaan bahwa keuntungan mereka dipengaruhi oleh kolaborasi, dan kesadaran aktor untuk berusaha memenuhi harapan organisasi dan harapan aktor lain dalam kolaborasi.

- d. *Mutuality* didefinisikan sebagai kualitas atau keadaan saling menguntungkan yang dimiliki oleh dua pihak atau lebih. Konsep ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik yang positif dan interaktif antar individu atau kelompok. Mutualitas diartikan sebagai keseimbangan antara saling memberi dan menerima, saling menghormati, dan saling memahami. Konsep ini dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk interpersonal, bisnis, dan hubungan masyarakat. Mutualitas dalam humas dapat diukur melalui empat dimensi: kepercayaan, kepuasan, komitmen, dan saling mengontrol. Dimensi mutualitas (*The Process of Forging Mutually Beneficial Relationship: The Mutuality Dimension*) berakar pada saling ketergantungan. Sebuah organisasi harus mengalami saling ketergantungan baik perbedaan kepentingan yang disebut sebagai "complementarities" (Powell, 1990). Komplementaritas menjelaskan situasi dimana suatu organisasi mengorbankan haknya untuk mendapatkan daya dari organisasi lain demi mencapai kepentingan mereka

sendiri. Dalam kolaborasi, adanya saling ketergantungan merupakan kunci yang penting agar hubungan antar aktor terus terjalin dengan baik.

Peneliti tidak menggunakan adanya faktor *outcomes* dikarenakan peneliti lebih fokus melakukan penelitiannya dalam hal proses suatu kolaborasi sehingga peneliti terfokus pada proses terjadinya kolaborasi dalam hal mangrove pesisir Desa Jangkaran. Di dalam *antecedents* dan *process* peneliti juga tidak memasukkan faktor *situation in wich each partner has resources that other partners need* dan *norms of trust and reciprocity* dikarenakan peneliti menemukan bahwa kedua faktor tersebut tidak menjadi faktor utama terjadinya kolaborasi yang berada di dalam pengelolaan mangrove pesisir desa Jangkaran

3. Konservasi mangrove

Konservasi mangrove merupakan upaya untuk melindungi dan melestarikan alam dengan menetapkan kawasan tertentu sebagai kawasan perlindungan laut. Mangrove berpotensi berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon dibandingkan hutan hujan tropis. Di Indonesia, mangrove banyak tumbuh di wilayah pesisir. Konservasi mangrove dapat dilakukan di kawasan manapun (Kusumo Wardhani, 2011). Konservasi mangrove memiliki beberapa manfaat yaitu mencegah erosi, tempat habitat perikanan, mencegah pemanasan global, menyeimbangkan iklim, sebagai kawasan suaka alam, sebagai paru-paru dunia melalui penyerapan dan penyimpanan karbon biru (*blue carbon*), sebagai pengendali perubahan iklim, sebagai pengendali pemanasan global, dan sebagai sistem penyangga kehidupan. Konservasi mangrove dapat dicapai

melalui peningkatan kegiatan konservasi sebagai sarana dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan restorasi dan pengelolaan mangrove, karena langkah proaktif yang dapat diterapkan merupakan kunci keberhasilan konservasi mangrove. Upaya tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekowisata. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan di cagar mangrove, seperti belajar, belajar atau sekedar mengagumi keindahan kawasan (Kurnia Binawati et al., 2015).

G. Definisi Konseptual

1. Collaborative Governance

Menurut Thomson dan Perry, (2020:23) Collaborative Governance “Kolaborasi adalah sebuah proses di mana aktor-aktor otonom berinteraksi melalui negosiasi formal dan informal, bersama-sama menciptakan aturan dan struktur yang mengatur hubungan mereka dan cara untuk bertindak atau memutuskan isu-isu yang menyatukan mereka; ini adalah proses yang melibatkan norma-norma bersama dan interaksi yang saling menguntungkan”

2. Inside the Black Box

Black box itu teori dari Thomson dan Perry yang terdiri dari *Antecedents, Process,*

3. Konservasi mangrove

Konservasi mangrove merupakan upaya untuk melindungi dan melestarikan alam dengan menetapkan kawasan tertentu sebagai kawasan perlindungan laut.

H. Definisi Operasional

a. *Antecedents* yaitu mengacu pada peristiwa atau keadaan yang terjadi atau ada sebelum kolaborasi dalam sistem manajemen keselamatan publik yang terdiri dari :

- *High levels of interdependance* yaitu tingkat saling ketergantungan yang tinggi
- *Need for resources and risk sharing* yaitu perlunya sumber daya menyoroti pentingnya pembagian sumber daya dan risiko dalam upaya kolaboratif.
- *Resource scarcity* yaitu kelangkaan sumber daya yang dapat mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan.
- *Complex issues* yaitu masalah yang dihadapi akan sulit apabila dilakukan sendiri, sehingga perlunya kolaborasi untuk mengatasi masalah tersebut

b. *Process* yaitu proses terjadinya kolaborasi dari tata kelola hingga norma kepercayaan dan timbal balik yang mana memiliki beberapa tahapan yaitu :

- *Governance* adalah mengacu pada suatu negara, aktivitas, atau usaha yang melibatkan pelaksanaan kebijakan pemerintah.
- *Administration* adalah hal yang mencakup segala upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, mulai dari pembentukan hingga pengelolaan segala sesuatunya.

- *Organizational Autonomy* adalah pilihan desain organisasi mendasar yang memegang posisi sentral dalam teori dan praktik manajemen.
- *Mutuality* yaitu sebagai kualitas atau keadaan saling menguntungkan yang dimiliki oleh dua pihak atau lebih.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Lexy J, 2006:4). Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat (Supardi, 2005:28).

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakikat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti (Tanzeh & Suyitno, 2006:116). Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan proses dari pengelolaan hutan mangrove yang ada di pesisir pantai Jangkar. Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian (Sugiyono, 2005:2).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Jangkar Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo. Tempat penelitian ini bertempat di wilayah konservasi hutan mangrove. Lokasi ini dipilih sebagai obyek penelitian untuk melihat kolaborasi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat sekitar kawasan konservasi. Lokasi ini dipilih sebagai obyek penelitian karena terjadi tanda-tanda lokasi konservasi hutan mangrove ini tidak terjaga dengan benar.

Desa Jangkaran merupakan salah satu desa yang terletak di Kapanewon Temon yang memiliki luas wilayah sekitar 365,64 Ha. Wilayah desa guwosari Kapanewon Temon ini juga berbatasan dengan wilayah sebagai berikut

- Sebelah Utara : Sungai Bogowonto
- Sebelah Timur : Desa Sindutan
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Purworejo

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang juga dapat memberikan informasi mengenai sebuah data. Berdasarkan sumbernya, maka data dibedakan menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder.

- Data Primer

Data primer yaitu merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan maksud untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti. Data primer ini juga dikumpulkan secara mandiri oleh peneliti langsung dari sumber yang pertama atau objek yang sedang diteliti. (Mustofa, 2015) Data dan informasi yang diperoleh juga melalui investigasi secara langsung di lokasi yang sedang diteliti. Sumber data ini juga dihimpun melalui proses wawancara

dengan penelitian dan juga pengamatan langsung yang nanti dilakukan di lapangan. Dalam penelitian ini data primer akan dihimpun melalui interaksi wawancara dengan pengelola hutan mangrove ataupun pemerintah Desa Jangkaran, serta juga hasil pengamatan yang dilakukan secara langsung di lapangan.

- Data Sekunder

Data Sekunder yaitu merupakan sebuah data yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti. Data ini juga dapat ditemukan dengan waktu yang cukup singkat yaitu dengan melalui jurnal, artikel, literaure serta situs yang yang dapat di akses melalui internet baik itu berupa dokumen, arsip ataupun dokumen pemerintah (Mustofa, 2015). Data sekunder ini juga merupakan sebuah data atau sebuah informasi yang telah tersedia sebelum pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini juga mencakup dengan berbagai dokumen yang berupa jurnal terkait kawasan konservasi hutan mangrove yang juga relevan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang akan diteliti. Teknik ini juga harus mempunyai Langkah yang strategis dan juga secara sistematis yang bertujuan

untuk mendapatkan data yang relevan dan tervalidasi sesuai kenyataan dengan yang ingin diteliti.

a. Observasi

Teknik observasi merupakan sebuah teknik yang melakukan sebuah pengamatan dan juga pencatatan yang dilakukan secara sistematis pada objek penelitian. Observasi juga biasanya dilakukan secara langsung dengan terjun ke lapangan. Observasi juga harus melakukan pengamatan secara sistematis tentang gejala yang sedang diteliti, selama melakukan observasi peneliti juga dapat mencatat hal atau data yang relevan yang dapat dikembangkan nantinya. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengobservasi bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh pihak pengelola kawasan konservasi hutan mangrove Jangkar.

b. Wawancara

Teknik wawancara merupakan sebuah teknik yang dilakukan secara langsung dan tatap muka antara penulis dengan narasumber. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam serta pengetahuan atau pendapat secara subjek terkait dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan kawasan konservasi mangrove Jangkar. Pelaksanaan wawancara ini bertujuan untuk mencari solusi terkait permasalahan yang terjadi dan juga pihak yang diwawancara diminta memberikan sebuah pandangan yang dapat membantu penulis yang menyelesaikan permasalahan. Subjek wawancara di

dalam penelitian ini seperti pengelola mangrove Jangkar, masyarakat setempat dan pemerintah Desa Jangkar.

Kriteria yang mendasari pemilihan para informan adalah orang-orang yang mempunyai keterkaitan dalam pengelolaan dan juga stakeholder yang terlibat dalam proses-proses yang dilakukan dalam pengelolaan hutan mangrove Jangkar.

Tabel 1

Data Informan

No	Jabatan
1	Ketua Kelompok Pengelola Kawasan Konservasi Mangrove Jangkar
2	Anggota Kelompok pengelola
3	Anggota Kelompok pengelola
4	Penanam Mangrove
5	Penanam Mangrove
6	Dukuh Kadilangu
7	Pemilik tambak udang
8	Kepala Desa Jangkar
9	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan sebuah teknik yang dapat di dapatkan melalui sebuah peninggalan arsip yang ada serta buku-buku mengenai sudut pandang, teori, postulat, atau hukum, pengumpulan data melalui arsip juga mencakup buku-buku

tentang berbagai topik yang berkaitan dengan masalah penelitian. Bila menggunakan metode penelitian kualitatif Alasan utama pengumpulan data adalah untuk menunjukkan hipotesis yang diajukan secara logis dan rasional dengan menggunakan keyakinan, teori, atau hukum, baik yang mendukung maupun menentang hipotesis tersebut. Dokumentasi juga bertujuan untuk penguat data observasi maupun wawancara guna untuk dapat memeriksa kebenaran untuk dapat menarik kesimpulan permasalahan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif ini menggunakan deskripsi untuk hasil analisisnya. Dengan data yang dimiliki, menyusunnya, dan membaginya menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola merupakan langkah-langkah dalam proses analisis data kualitatif. Selain menggabungkan data, mencari tren, dan menentukan apa yang akan diteliti, tugas lainnya termasuk menentukan apa yang signifikan dan apa yang harus dikomunikasikan kepada orang lain.

1. Reduksi Data

Reduksi data, penggunaan pemilihan data yang relevan dan bermakna, dan konsentrasi pada data tersebut menghasilkan pemecahan masalah, penemuan, dan makna atau untuk menanggapi pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan Jelaskan poin-poin penting dari temuan dan signifikansinya. Hanya data atau temuan yang ditemukan selama prosedur reduksi data. hanya yang berkaitan dengan masalah penelitian

berkurang. Namun, informasi yang tidak berhubungan dengan masalah penelitian dihilangkan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sebuah data dapat disajikan secara lisan atau tertulis, maupun melalui penggunaan gambar, grafik, dan tabel. Tujuan penyajian data adalah menggabungkan data sedemikian rupa sehingga dapat dideskripsikan keadaan peristiwa tersebut. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan Peneliti harus berusaha untuk menangkap materi, baik itu pengetahuan secara keseluruhan maupun temuan penelitian yang spesifik. cerita, matriks, atau grafik untuk membantu penguasaan data atau informasi tersebut. Peneliti dapat mempertahankan kendali atas data dengan cara ini hindari terbawa oleh kesimpulan yang diambil dari informasi yang bisa membosankan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan merupakan sebuah kegiatan yang dicapai selama proses penelitian, seperti pada tahap reduksi data. Setelah sejumlah besar data terkumpul, kesimpulan awal dibuat, dan setelah semua data terkumpul, kesimpulan akhir dicapai. Sejak awal, para peneliti telah berupaya menafsirkan informasi yang mereka kumpulkan. Sangat penting untuk mencari pola, tema, korelasi, persamaan, item yang sering muncul, teori, dan hal-hal lain untuk tujuan ini. Hasilnya awalnya ragu-ragu, kabur, dan dipertanyakan, namun seiring bertambahnya jumlah data, hasil wawancara dan observasi, serta data penelitian secara keseluruhan, menjadi baik.